

Cinta adalah sesuatu yang menakjubkan. Kamu tidak perlu mengambilnya dari seseorang untuk memberikannya kepada orang lain. Kamu selalu memilikinya lebih dari cukup untuk diberikan kepada orang lain.

Habiburrahman El-Shirazy
Novelis Islami

EDISI KAMIS | Edisi 19 Desember 2019

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

MENANTI SANG PENGAWAS 'TURUN GUNUNG'

Slentingan nama-nama yang duduk di Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyeruak. Mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki, mantan Hakim Agung MA Artidjo Alkotsar hingga hakim Albertina Ho disebut Presiden Jokowi. Rakyat menunggu gebrakanmu!

Para penegak hukum yang selama ini dikenal memiliki 'taring tajam' disinyalkan akan segera 'turun gunung' membantu pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi. Ditempatkan sebagai Dewan Pengawas (Dewas) KPK, mereka diharapkan memperkuat benteng pertahanan Indonesia dari tindak rasuah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengungkapkan ada sejumlah nama yang diusulkan untuk posisi ini. Nama-nama tersebut mulai dari mantan Ketua KPK Taufiequrahman Ruki hingga hakim Albertina Ho.

"Dewan Pengawas KPK ya nama-nama sudah masuk tapi belum difinalkan karena kan hanya 5, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana," kata Presiden Jokowi di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).

Selain Albertina Ho dan Taufiequrahman Ruki, ada juga nama mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Artidjo Alkotsar. Namun, kata Jokowi, nama-nama itu masih sebatas usulan.

(Baca, Hal 11)



Artidjo Alkotsar
Situbondo, 22 Mei 1948

Jejak Karir

- Hakim Agung Mahkamah Agung
- Dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta
- Pengacara Human Right Watch Divisi Asia
- Direktur LBH Yogyakarta
- Mendirikan Artidjo Alkotsar and Associates.



Albertina Ho
MalUt, 1 Januari 1960

Jejak Karir

- Hakim PN Yogyakarta
- Hakim PN Jawa Tengah
- Sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial
- Hakim di PN Jakarta Selatan
- Ketua PN Sungai Liat
- Wakil Ketua PN Palembang
- Ketua PN Bekasi
- Hakim Tinggi PT Medan



Taufiequrahman Ruki
Banten, 18 Mei 1946

Jejak Karir

- 1991 – 1992 Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya
- 1992 Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar
- 1992–1997 Kepala Kepolisian Wilayah Malang.
- 1992-1999 Anggota DPR RI, Komisi III/Hukum Fraksi ABRI
- 1999–2001 Anggota MPR RI
- 2003-2007 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Surabaya - Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengungkapkan pada tahun 2019 sebanyak 15 ribu anak menderita stunting. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Febria Rahmanita, mengatakan jumlah tersebut menurun bila dibanding tahun 2018 yang mencapai 16 ribu anak.

"Penyebabnya itu kekurangan gizi kronis, kemudian disertai penyakit lainnya. Pada saat masih bayi, bila ukuran kurang dari 47 sentimeter, kita harus curiga, dan segera didampingi agar tidak menjadi stunting," kata Febria di Balai Pemuda, Surabaya, Rabu (18/12).

Febria menyebut, sejak tahun 2016, ibu hamil sudah mendapatkan pendampingan dari Dinkes Pemkot Surabaya. Pasalnya, untuk mencegah anak stunting dimulai pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Masa tersebut merupakan masa kritis, balita membutuhkan gizi dan perilaku hidup sehat lingkungan

15 Ribu Anak Stunting, Surabaya Perangi Gizi Buruk

sekitarnya. "Tetapi terkadang untuk mendampingi ibu hamil, kadang dari suami menolak. Namun, kita terus berusaha," jelasnya.

Anak-anak yang lolos pendampingan mendapatkan sertifikasi 1.000 HPK. Sementara, bagi anak balita yang terindikasi stunting, pemerintah berupaya menggenjot pemberian vitamin, seperti Minyak Ikan untuk menunjang gizinya. "Mudah-mudahan jumlah (stunting) terus menurun," harapnya.

Salah satu upaya memerangi Stunting adalah penyelenggaraan kegiatan komitmen bersama percepatan pencegahan anak kerdil di Balai Pemuda, Rabu (18/12). Acara ini dihadiri sekitar 1.200 peserta meliputi Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Pusat dan Jatim, Perwakilan Perguruan Tinggi, Pimpinan rumah sakit, 900 kader, undangan, kepala puskesmas, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Paguyuban Pos PAUD terpadu, serta perwakilan Dampingan Program 1.000 HPK.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta kepada para undangan yang hadir agar bekerja keras mencegah anak stunting. Menurutnya, pencegahan stunting ini penting dilakukan karena mempengaruhi kecerdasan

anak. "Biasanya, kalau gizinya kurang, kecerdasannya juga kurang. Bagaimana mungkin kita bisa bersaing kalau kecerdasan kurang," ujar Risma.

Ia juga mengingatkan para lurah agar memperhatikan permakanaan, terutama untuk warga kurang mampu. Bagi ibu hamil, ia meminta untuk mendapatkan permakanaan tambahan dari puskesmas. "Sebetulnya (pemberian makanan) kita sudah lakukan untuk Ibu hamil dan warga miskin," tandasnya.

Perwakilan Tim Percepatan Pencegahan Stunting dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Saputera mengatakan bahwa Kota Surabaya merupakan salah satu kota prioritas dalam program percepatan pencegahan Stunting. Program Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) secara nasional dilaksanakan di tahun 2018 – 2024. Di tahun 2020, sebanyak 260 kabupaten/kota yang menjadi prioritas nasional.

"Di 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sangat penting asupan gizi, kemudian kesehatannya. Jadi pemantauan mulai hamil, melahirkan sampai anak usai 2 tahun," katanya.

Ia mengapresiasi program pemerintah kota dalam penanganan stunting, hingga pembentukan satgas stunting di lingkungan pemerintah kota. "Saya baru mendengar di kelurahan ada anggaran untuk penanganan stunting. Ini luar biasa. Saya pikir terobosan ini, belum ada di kabupaten kota lainnya," pungkasnya.(ard)

Warga Blitar Tagih Penyelesaian 5 Kasus Korupsi yang Mandek

Blitar - Puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) Blitar menuntut penuntasan kasus korupsi dan kasus lain yang menjadi atensi publik. Aksi yang digelar sekaligus memperingati Hari Anti Korupsi ini dilakukan di luar pagar Mapolres Blitar di Jalan Raya Talun Kabupaten Blitar dan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar di Jl. dr Soetomo Kota Blitar, Rabu (18/12).

Koordinator KRPK, M Triyanto mengatakan bersamaan dengan momentum Hari Anti Korupsi, mereka menggugat keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum di Blitar Raya dalam menuntaskan kasus korupsi dan kasus lain yang hingga kini tidak jelas proses hukumnya.

Diungkapkan Triyanto setidaknya ada 5 kasus yang selama ini belum dituntaskan, meskipun bukti-buktinya jelas. Diantaranya kasus dana Hibah KONI Kabupaten Blitar tahun 2015 senilai Rp 972 juta, yang diduga melibatkan 12 anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2009 - 2014. "Ternyata hanya 2 orang yang dijadikan tersangka dan menjalani hukuman, yaitu ketua dan bendahara KONI saja. Padahal diduga kuat 12 anggota dewan itu ikut menikmati, karena

mengembalikan dana nya tapi tidak diusut," ungkapnya.

Kemudian kedua, kasus pungli dana workshop honorer K2 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tahun 2012 senilai Rp 292 juta dengan 5 tersangka, hingga saat ini kelimanya tidak ditahan.

Ketiga, kasus korupsi di SMK Negeri 1 Blitar yang sudah ditetapkan tersangkanya, tapi sampai sekarang belum disidangkan.

Keempat, kasus korupsi dana Pilkada di KPU Kabupaten Blitar, dimana tersangkanya masuk DPO dan hingga saat ini juga tidak ada kelanjutannya.

Terakhir, kasus pembuat dan penyebar surat pemanggilan KPK palsu untuk Bupati Blitar, dimana sudah 428 hari tidak ada perkembangan apa pun. "Hingga kini selalu saja alasannya dipelajari dan dialami, diduga kuat ada intervensi pihak luar dan kasus ini akan dipetieskan. "Oleh karena itu kami memberikan sindiran, berkas yang sengaja tidak diusut atau diproses karena sudah berubah menjadi beras," teriak Triyanto sambil menunjukkan beras yang dibawa massa yang berunjuk rasa.



Setelah menyampaikan aspirasinya, Kapolres Blitar AKBP Budi Hermanto menemui massa dan memberikan tanggapan mengenai tuntutan massa KRPK. "Apa yang disampaikan rekan-rekan KRPK, kami sampaikan bawah semua itu tetap diproses bukan mandek. Untuk kasus KONI berkas perkara sudah kami pelajari dan masih banyak langkah yang harus dilakukan, demikian juga kasus pungli workshop honorer K2. Kelengkapan berkas sudah 80 persen, bahkan 6 kali bolak balik dari kejaksaan, dan terus tetap akan kami penuh sampai lengkap," terang AKBP Budi.

Kemudian mengenai kasus surat palsu KPK kepada Bupati Blitar, kapres mengaku akan menunggu hasil proses dari salah satu lembaga yang tidak bisa disebutkan kepada publik dalam proses investigasi. "Tapi sudah saya sampaikan kepada mas Triyanto, jadi kami minta rekan-rekan KRPK percaya bahkan kita tetap memproses apa yang disampaikan," tegas AKBP Budi.(ais)

DPRD SURABAYA KRITISI PENGEMBANG YANG **ABAIKAN** FASUM-FASOS

Surabaya- Berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya (Perwali) Nomor 14 Tahun 2016 terkait penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), pengembang wajib menyediakan dua hal tersebut saat membangun permukiman. Sayangnya, di Surabaya banyak pengusaha property yang mengabaikannya. Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya pun mengkritisinya.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafii mengatakan pada saat rapat dengar pendapat beberapa hari lalu disebutkan masih banyak fasum dan fasos yang semula dijanjikan pengembang, dalam perjalanannya justru dihilangkan atau bahkan dijual kembali oleh pihak pengembang.

"Anehnya, pemkot justru membiarkan perubahan 'site plan' (rencana tapak) tersebut, bahkan cenderung menyetujui," katanya, Rabu (18/12).

Padahal, kata dia, perubahan 'site plan' yang menyangkut fasum dan fasos dalam Perwali Surabaya 14/2016 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada

Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Pemukiman Kepada Pemerintah Daerah, harus mendapat persetujuan paling tidak 2/3 warga.

Namun, kata politikus NasDem itu, faktanya banyak pengembang perumahan yang seenaknya menghilangkan fasum dan fasos dengan mengubah "site plan".

"Ini sangat merugikan masyarakat, terutama para konsumen. Kondisi seperti ini banyak dan dibiarkan terjadi sejak lama. Padahal mereka membeli hunian berdasar promosi yang di dalamnya menawarkan fasum dan fasos," ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut dia, dalam dengar pendapat juga diungkapkan susahnyalah pihak pengembang yang sudah lama berdiri menyerahkan fasum dan fasos ke pihak Pemkot Surabaya lantaran banyak sekali persyaratan.

Padahal, kata dia, dengan tidak diserahkannya fasum dan fasos, maka pengembang harus terus membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini seperti diungkap pengembang Sinar Galaksi di Jalan Kertajaya dalam dengar pendapat.

Menurut Imam, apabila fasum dan fasos sudah



Imam Syafii,
Anggota
Komisi A DPRD
Surabaya

saatnya diserahkan, maka Pemkot Surabaya tidak semestinya mempersulit. "Bisa dibayangkan biayanya fasum dan fasos perumahan besar seperti itu tetap dikelola pengembang. Padahal rumah-rumah di situ sudah terjual semua, kan perumahan lama itu," ujarnya.

Untuk itu, Imam mengatakan ke depan Komisi A akan memanggil para pengembang perumahan terkait penyediaan fasum dan fasos. "Masyarakat yang merasa dirugikan tinggal lapor, nanti kita tindaklanjuti," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKP CKTR) Kota Surabaya Robben Rico sebelumnya mengatakan bisa memaklumi dan pihaknya menjamin tidak ada luasan fasum dan fasos yang hilang. "Itu prinsip, tidak akan ada fasum dan fasos yang hilang. Paling nanti pindah posisi. Tadinya di tengah bergeser ke pinggir," kata Robben.(ard,ant)

PILKADA SIDOARJO, PKB MASIH **MATANGKAN** PUTUSAN

Sidoarjo - Di akhir tahun 2019, partai politik mematangkan strategi menghadapi Pilkada serentak 2020. Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim misalnya, sudah memutuskan beberapa nama calonnya. Meski demikian, ada beberapa daerah yang juga masih dalam tahap pendalaman.

"Sebagian ada yang sudah jelas siapa calonnya dan ada yang belum, masih dibaca. Ada yang karena koalisi murni kayak Pacitan, sehingga sedang dalam proses komunikasi dengan partai koalisi," ujar Wakil Ketua DPW PKB Jatim Hikmah Bafaqih, Rabu (18/12).

Terkait dengan Sidoarjo misalnya, masih belum ada putusan. Sebab ada beberapa calon yang muncul. Sehingga untuk para calon ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut. "Tentu kami pelajari terlebih dulu. Termasuk pasangan

bagi calon yang sudah kami usung," tegasnya.

Sedangkan beberapa daerah yang sudah pasti pencalonannya adalah Lamongan dan Sumenep. Untuk Lamongan, lanjut Hikmah, PKB menjatuhkan mengusuh Sholahudin, sedangkan untuk Sumenep sudah memastikan diri mendukung Fatah Yasin. "Yang jelas perlakuan antar daerah tidak sama, melihat kondisinya," tandasnya.

Sebelumnya Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin masih belum menentukan sikap. Dia lebih memilih menyerahkan semua mekanismenya pada kebijakan partai. Hal itu disampaikan Wabub yang akrab dengan sapaan Cak Nur ini saat acara cangkruan bareng bersama Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kab. Sidoarjo, di Warung Kopi Pinilih Porong Sidoarjo (17/12) malam. Acara bertema ngopi (ngobrol politik) ini sudah menjadi agenda rutin Pemuda Muhammadiyah dengan menghadirkan



Hikmah
Bafaqih,
Wakil Ketua
DPW PKB Jatim

tokoh – tokoh berkompeten.

Dalam acara yang juga menyinggung tentang Pilkada serentak ini, Cak Nur belum bisa menjawab tentang posisinya dalam pencalonan kepala daerah. "Saya masih menunggu keputusan partai karena kita juga menjaga elektabilitas Partai, yang saya tahu mekanisme Partai dalam menentukan rekomendasi salah satunya ada survey," katanya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan masalah pencalonan tetap masih menunggu keputusan partai dan juga akan menghormati semua keputusan partai. "Kita harus menjaga hubungan baik dengan structural partai, saya tidak pernah melanggar keputusan jadi saya ikuti aja keputusan partai," jelasnya. (pin/ufi)

JALAN NASIONAL DI JATIM SIAP UNTUK LIBUR NATARU



Sidoarjo - Kemantapan jalan nasional di Jawa Timur saat ini mencapai 93,18 persen atau 2.200,19 km dari total panjang jalan nasional 2.361,23 km.

Untuk jalan yang statusnya tidak mantap hanya 6,82 persen atau 161,04 km. Yang rusak berat 0,83 persen atau 19,60 km, rusak ringan 5,99 persen atau 141,44 km, rusak sedang 45,48 persen atau 1073,89 km, sementara sisanya dalam kondisi baik mencapai 47,70 persen atau 1126,31 km.

"Secara keseluruhan jalan nasional di Jatim siap untuk dilintasi selama libur Natal tahun 2019 dan Tahun Baru 2020," kata Achmad Subki, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) VIII, Rabu (18/12).

Mengantisipasi timbulnya bencana seperti longsor dan banjir, BBPJJN VIII telah menyiapkan 25 Posko. Posko-posko tersebut menempati kantor para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada sejumlah daerah. Setiap posko telah dilengkapi sejumlah alat berat. Yang setiap saat selama 24 jam bisa dimobilisasi pada lokasi yang sedang terjadi bencana.

"Untuk kenyamanan para pengguna jalan, kami juga memanfaatkan posko tersebut sebagai tempat istirahat. Masyarakat bisa memanfaatkan toilet atau musala yang tersedia pada masing-masing posko," tambah Subki.

Subki menyebutkan, ada 12 titik atau lokasi

pada ruas jalan nasional yang rawan longsor dan 21 titik yang rawan banjir. Sejumlah wilayah yang rawan longsor di antaranya di Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Ngawi, Lumajang, Situbondo dan Banyuwangi. Sementara wilayah yang rawan banjir di antaranya Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Kota Surabaya, Babat Lamongan dan delapan titik di ruas Pantura di Pulau Madura.

"Pada sejumlah ruas yang rawan longsor dan banjir, kami mengimbau pengguna jalan agar lebih waspada saat melintas. Khususnya saat terjadi hujan," lanjutnya.

Pengguna jalan juga disarankan lebih berhati-hati saat melintasi sejumlah ruas jalan nasional yang dilintasi rel kereta api. Pasalnya, pada lokasi tersebut saat hujan turun memiliki kecenderungan licin dan rawan terjadinya kecelakaan. Ruas jalan nasional di Jatim yang dilintasi rel kereta api ADA di 65 titik. Terdiri atas 55 titik perlintasan sebidang dan 10 titik perlintasan tak sebidang.

Lintasan tersebut tersebar pada sejumlah wilayah, di antaranya di jalan nasional lintas utara Jatim yang memiliki 14 lintasan sebidang dan 3 lintasan tidak sebidang. Lalu jalan nasional lintas tengah Jatim memiliki 11 lintasan sebidang dan 2 lintasan tidak sebidang. Sedangkan jalan nasional lintas selatan Jatim memiliki 15 lintasan sebidang dan 3 lintasan tidak sebidang. Terakhir jalan nasional penghubung

lintas provinsi, memiliki 15 lintasan sebidang dan 2 lintasan tidak sebidang.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (Dishub Jatim) memastikan pembangunan Jalan Nasional di Jatim selesai pada Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Timur Fattah Jasin mengatakan, dari hasil rapat koordinasi bersama BBPJJN VIII kondisi jalan nasional yang membentang dari Ngawi hingga Banyuwangi ini siap menyambut libur Nataru.

"Saya ingin pastikan bahwa struktur jalan nasional di Jatim itu, secara fisik 94 persen mantap, artinya ini juga akan mendukung kelancaran arus transportasi di darat," ujar Fattah.

Senada, Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan Dishub Jatim Sherlita Agustin berkomitmen bakal segera menyelesaikan proyek pembangunan jalan nasional sebelum libur panjang Nataru tiba.

"Terakhir proyek itu tanggal 20 Desember, tapi tanggal 20 itu juga tidak tanggal 20 malam, maksimal siang sudah selesai semua," terangnya.

Pihaknya menilai, proyek siap digunakan sebelum libur sekolah, yang jatuh pada 21 Desember, dimulai. Maka, tidak menutup kemungkinan pada tanggal 20 Desember malam jalan sudah digunakan masyarakat untuk berlibur.

"Pada tanggal tersebut, semua alat berat termasuk material juga sudah harus dibersihkan dari badan jalan sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas," pungkasnya.

Sementara itu, pemerintah juga bakal membatasi aktivitas angkutan barang di Jalan Nasional pada tanggal 20-21 Desember mendatang. Alasannya, untuk mengurangi potensi kemacetan.

Pembatasan angkutan barang pada tanggal 20-21 Desember dimulai dari pukul 00.00 WIB hingga 24.00 WIB. Kemudian, pada tanggal 31 Desember sampai 1 Januari dari pukul 00.00 WIB sampai pukul 24.00.

Pembatasan angkutan barang ini hanya berlaku di lintas Mojokerto-Madiun, Pandaan-Malang, dan Probolinggo-Lumajang.

"Tetapi ada diperkecualikan truk yang membawa air dalam kemasan, migas, BBM, kemudian ekspor-impor, ternak dan sembilan bahan pokok, itu diperbolehkan," jelas Jasin. "Jadi untuk kurangi beban jalan, saya kira itu," pungkasnya. (ins/bjt)



Xiaomi Luncurkan Sepeda Berbantuan Listrik Rp 6 Jutaan



Xiaomi, yang selama ini dikenal dengan produk smartphone-nya, juga memantapkan kehadirannya di pasar produk gaya hidup. Perusahaan ini telah meluncurkan lebih dari 44 produk tahun ini yang bukan bagian dari jajaran smartphone-nya

Tekarang Instagram akan meminta pengguna baru erbaru, Xiaomi meluncurkan sepeda berbantuan tenaga listrik Qicycle. Sepeda baru ini memiliki desain yang mirip dengan sepeda listrik QIE dan sepeda lipat EF1.

Ini adalah model generasi kedua yang telah ditingkatkan dalam banyak aspek mulai dari penampilan hingga kinerja. Dibandingkan dengan sepeda listrik Qicycle generasi sebelumnya yang dapat dilipat, ukuran sepeda baru ini lebih besar.

Diameter roda 20 inci membuat lebih stabil dan disesuaikan untuk digunakan di jalan-jalan kota dan bisa juga jalan pegunungan. Dalam hal penampilan, sepeda berbantuan listrik Xiaomi mempertabahkan gaya desain yang sederhana dan terlihat seperti sepeda biasa. Baterai sepenuhnya disimpan ke tabung di

kerangka. Pengguna bisa memilih apakah akan menggowes dengan tenaga sendiri, dibantu listrik atau listrik penuh.

Ada layar di tengah setang e-bike, yang menunjukkan roda gigi, kecepatan, daya baterai, lampu, peringatan alarm, dan persentase daya baterai selama pengisian. Sisi kiri stang adalah area kontrol, termasuk saklar daya, tombol klakson, sakelar gigi tinggi dan rendah. Di sisi kanan stang, ada sakelar throttle putar yang sama dengan sepeda listrik. Memutar ke dalam posisi 1,2,3 menyalakan pengendalian mode elektrik penuh.

Sepeda dari aluminium ini, dilengkapi baterai lithium 5,2 Ah, yang dapat menempuh 40km. Output dari mode listrik dapat mencapai kecepatan 25 km / jam. Baterai dapat terisi penuh hanya dalam 3 setengah jam. Sepeda Xiaomi ini di Cina dibanderol 2999 yuan atau hampir Rp 6

juta. Belum ada kabar apakah akan dipasarkan di Indonesia.

Sebelumnya, pada 23 April 2019, Xiaomi meluncurkan sepeda listrik Mi HIMO T1. Saat ini, sepeda dihargai 2.999 Yuan (sekitar Rp 6,3 juta) dan mulai dikirim pada 4 Juni.

Perusahaan mengatakan bahwa Xiaomi HIMO Electric Bicycle T1 didasarkan pada desain yang dipatenkan dengan bahan dan cat tahan api. Alat pengukur jarak hadir dalam tampilan digital dengan tenaga surya.

Lampu utama sudah LCD dengan jarak jangkauan 5 - 15 meter. Tenaga sepeda listrik ini berasal dari motor magnet permanen 350W yang diklaim menawarkan kinerja high-end. Sepeda ini dilengkapi rem cakram hidrolis di roda depan, dan rem belakang mengadopsi sistem rem drum yang aman dan tahan lama.

Sepeda ini dilengkapi dengan tombol start sekali sentuh serta sakelar kombinasi multi fungsi dan tombol sentuh untuk mengendalikan sepeda saat mengemudi. Baterai berkekuatan 14000 mAh yang diklaim bisa mencapai jarak 120 kilometer sekali pengisian daya. Tidak dijelaskan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengisi daya sampai penuh. Xiaomi akan menawarkan sepeda listrik ini dengan cara crowdfunding.(ins)


KARTINI MULJADI,
BOS TEMPO SCAN GROUP
KARTINI
MULJADI,

"Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang baik. Maka kita, manusia, harus melakukan hal-hal yang baik,"

Mantan Hakim yang Kini Jadi **Srikandi Tertajir** di RI

Forbes merilis data 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2019. Dari daftar tersebut, terdapat dua perempuan yang masuk dalam orang paling tajir di Indonesia. Kartini Muljadi menjadi srikandi paling tajir di Indonesia melalui Tempo Scan Group, produsen obat dan consumer goods

Kartini Muljadi yang berada di peringkat 48 daftar orang terkaya di Indonesia mendapatkan pundi-pundi kekayaannya dari sejumlah bisnis yang bergerak di berbagai sektor. Bidang bisnis yang Kartini dan Arini jalankan di antaranya kosmetik, obat-obatan, consumer goods, dan batubara.

Kekayaan yang Kartini Muljadi miliki mencapai US\$ 630 juta atau sekitar Rp 8,82 triliun (kurs Rp 14.000). Dia menyandang status sebagai orang terkaya ke-48 pada usia 89 tahun.

Mengutip Forbes, Kartini Muljadi dan anaknya memiliki Tempo Group dengan perusahaan terbesarnya adalah PT Tempo Scan Pacific yang bergerak di bidang consumer goods dan obat-obatan.

Dalam laman resmi Tempo Scan Group, beberapa produk obat-obatan yang mereka produksi adalah Bodrex, Vidoran, Hemaviton, Oskadon, Bodrexin, Neo Rheumacyl, Oskadryl, Contrexyn, serta Zevit Grow.

Di lini consumer goods, produk Tempo Scan Group, misalnya, Marina, My Baby, S.O.S, Total Care, Claudia, dan Pure Baby. Selanjutnya untuk lini kosmetik, Tempo Scan Group memiliki produk Ultima II.

Perusahaan ini juga mendistribusikan beberapa merek kosmetik berlisensi internasional ternama di Indonesia. Merek kosmetik itu seperti Revlon, Estee Lauder, Clinique, MAC, Bobbi Brown, La Mer, dan Jo Malone London.

Kartini memang memulai perjalanan karirnya

bukan dari pengusaha. Dia memulai karir sebagai seorang pengacara dan mantan hakim. Dikutip dari situs Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI), Kartini memulai karirnya sebagai hakim.

Pada situs itu, Kartini disebut sebagai orang sukses. Wanita kelahiran 17 Mei 1930 ini pada masa kecilnya merasakan pendidikan sekolah khusus keturunan Belanda.

Kartini sempat kuliah pada perguruan tinggi di Surabaya dan Yogyakarta, Kartini kemudian pindah ke Jakarta untuk masuk Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. Di sela-sela kuliahnya, Kartini bekerja di Perhimpunan Sosial Tjandra Naya yang maksud tujuannya adalah menyelenggarakan pendidikan serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Wanita ini meraih gelar sarjana hukum pada 1958, pada saat itu Kartini telah mempunyai dua orang anak. Kartini kemudian memutuskan berkarir di bidang Kehakiman dan diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta, di mana dia ditugaskan untuk menangani perkara pidana, perdata dan kepailitan.

Pada saat Kartini mulai tugasnya di Pengadilan, para Hakim warga negara Belanda baru mengundurkan diri dan digantikan oleh Hakim warga negara Indonesia. Setelah suaminya yang bernama Djojo Muljadi SH, semasa hidupnya bekerja sebagai notaris, meninggal dunia dalam tahun 1973, Kartini mengundurkan diri sebagai Hakim karena merasa pendapatannya sebagai Hakim yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak akan cukup untuk membiayai keluarganya.

Setelah menempuh dan lulus ujian negara untuk notariat, Kartini diangkat sebagai Notaris berkedudukan di Jakarta, dan mulai mengajar mata kuliah perdata dan hukum acara perdata di beberapa fakultas hukum di Jakarta. Konsistensinya dan komitmennya yang tinggi dalam memberi pelayanan terbaik sebagai Notaris, menjadikannya sebagai notaris papan atas, yang menjadi rujukan perusahaan-perusahaan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an.

Tahun 1990, setelah mengundurkan diri lebih dini dari jabatannya sebagai Notaris, Kartini mendirikan kantor pengacara dan konsultan hukum dengan nama Kartini Muljadi & Rekan. Kantor hukumnya pun

berkembang pesat; tidak hanya perusahaan-perusahaan besar nasional namun juga perusahaan multinasional, yang menjadi langganannya.



Perusahaannya Kartini Muljadi & Rekan (KMR) adalah sebuah firma hukum perusahaan dan komersial Indonesia yang terkenal. Putranya, Handojo Selamat Muljadi yang lulusan New York University saat ini turut menjalankan Tempo Scan.

Ketika terjadi badai krisis keuangan tahun 1997/1998, Kartini terlibat aktif dalam memberikan bantuan hukum untuk membangkitkan sektor perbankan yang terpuruk. Dia diangkat sebagai anggota tim yang bertugas memberikan nasehat hukum pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), serta memberikan pendapat hukum dan rekomendasi kepada instansi pemerintah terkait, memprakarsai Master Settlement dan Master Refinancing Agreement antara BPPN dan para pemegang saham bank-bank bermasalah.

Kini Kartini Muljadi dikenal sebagai pemilik Tempo Scan Group yang mayoritas bisnisnya bergerak di bidang farmasi. Puncaknya yakni saat Tempo Scan Group melepas

Kini Kartini Muljadi dikenal sebagai pemilik Tempo Scan Group yang mayoritas bisnisnya bergerak di bidang farmasi. Puncaknya yakni saat Tempo Scan Group melepas saham ke publik pada 2013 lalu dan mendapatkan dana sebesar US\$ 218 juta.

Dia juga pernah menjabat anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (2002-2007) dan menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (2004-2007). Kartini mendirikan Yayasan Daya Bhakti Pendidikan Universitas Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan, terutama membimbing calon-calon pemimpin bangsa.

Karena kerja kerasnya, Kartini turut membangkitkan kembali sektor keuangan, khususnya menggiatkan kembali pasar modal di Indonesia. Kartini menerima penghargaan dari Megawati Soekarno Putri yang pada saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia dengan memberikan kepada Kartini penghargaan Capital market Life Time Achievement Award pada tahun 2004.

Di usia tuanya, dia tetap bersemangat menjalankan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. "Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang baik. Maka kita, manusia, harus melakukan hal-hal yang baik," katanya.(ins)


Daging Merah

Daging Merah

Vs Ayam, Lebih Sehat Mana?


Daging ayam

Salah satu sumber protein untuk tubuh adalah protein hewani seperti daging-dagingan. Namun banyak orang merasa galau dalam memilih daging mana yang lebih sehat. Misalnya, banyak beredar informasi soal daging merah dapat menyebabkan penyakit, lantas apakah daging ayam lebih sehat?

Ketua departemen kebidanan/ginekologi dan ilmu reproduksi di Hackensack University Medical Center di New Jersey, dr Manny Alvarez menjawab, tidak ada daging yang lebih baik untuk setiap orang karena kebutuhan nutrisi tiap orang berbeda-beda. Namun untuk memilih mana yang lebih baik untuk dikonsumsi, sebaiknya mempertimbangkan daging yang rendah lemak dan tinggi protein.

Misalnya sirloin, yaitu daging sapi has luar yang berasal dari bagian daging yang terletak di daerah punggung dekat dengan paha belakang sapi. Tiga ons sirloin mengandung

25 gram protein.

"Seringkali, daging bukanlah masalahnya, tetapi menambahkan garam dan bumbu dapat membuatnya kurang sehat," ujar dr Manny dikutip dari Fox News.

Selain sirloin, daging ayam juga baik untuk dikonsumsi karena mengandung lemak baik, asam lemak, dan zat besi. Namun menjadi tidak sehat ketika daging ayam digoreng, menurut dr Manny lebih baik dipanggang.

dr Manny mengatakan, baik daging ayam ataupun daging merah sama-sama baik untuk kesehatan. Daging merah mengandung vitamin B3, vitamin B12, vitamin B6, zat besi, seng, dan selenium. Namun yang menjadi masalah ketika mengonsumsinya secara terus-menerus. Menurut penelitian dapat menyebabkan masalah jantung.

"Lebih baik makan daging merah sebagai bagian dari diet yang sehat dan seimbang dan berusaha secara keseluruhan untuk gaya hidup dan diet yang sehat," pungkasnya.



//
tidak ada daging yang lebih baik untuk setiap orang karena kebutuhan nutrisi tiap orang berbeda-beda. Namun untuk memilih mana yang lebih baik untuk dikonsumsi, sebaiknya mempertimbangkan daging yang rendah lemak dan tinggi protein."

- dr Manny Alvarez -



abadikan keseksian tubuhnya dengan melakukan photoshoot. Wanita berambut pirang ini terlihat mengenakan dress berwarna putih yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan latar belakang pepohonan hijau. Bikin mata jadi adem.

Penampilan gadis cantik ini langsung berubah 180 derajat saat mengenakan perlengkapan tinjunya. Ia menunjukkan penampilan yang gagah dengan sorot mata yang tajam dengan balutan sarung tinju berwarna emas dan sport bra berwarna hijau toska.

Meski penampilannya cantik dan seksi, keahlian Sharipova bukan kaleng-kaleng. Seridaknya dua sabuk kejuaraan berhasil diperoleh dari olahraga tinju yang telah membesarkan namanya. Ia berpose sambil mengenakan pakaian tinjunya dan menyilangkan dua sabuk kemenangan pada bahunya.

Pada unggahan foto lainnya, Sharipova terlihat melakukan photoshoot dengan menggunakan kostum 'Princess' yang cantik jelita. Ia berpose dengan sangat manis di balik pohon cemara mini dengan latar belakang kerajaan mirip seperti di negeri dongeng.

Seperti diketahui, olahraga tinju juga cocok dilakukan bagi perempuan yang ingin menjaga kesehatan tubuh. John Kalu, seorang pelatih kebugaran dari LA Fitness di Los Angeles mengatakan, "Bertinju yang baik akan membuat Anda bernapas secara berat dan meningkatkan detak jantung, dimana jantung kemudian memompa darah ke seluruh penjuru tubuh. Detak jantung yang meningkat akan memperkuat otot-otot jantung Anda dan menurunkan kemungkinan Anda mengalami penyakit kardiovaskular sekaligus strok," jelasnya. (ins)

Iman Sharipova, Petinju Seksi yang Ajak Duel Putin

Wajah-wajah cantik selalu menghiasi cabang olahraga di seluruh dunia, tidak terkecuali tinju. Meskipun identik dengan kekerasan, namun masih ada saja petinju wanita yang memiliki paras cantik serta tubuh yang seksi.

Salah satunya adalah Iman Firuza Sharipova, walau tampak feminim namun kemampuannya tidak perlu diragukan lagi. Pada tahun ini salah satu rumah judi di Kazakhstan menawarkan laga Sharipova melawan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Bahkan beberapa nama besar lain seperti petarung Mix Martial Art (MMA), Khabib Numagomedov dan Presiden Republik Chechnya, Ramzan Kadyarov juga turut dikaitkan dengan sosok wanita berusia 25 tahun ini.



Merangkum dari Instagram pribadinya @sharipova_firuz, Sharipova adalah gadis cantik yang gemar traveling. Terbukti pada unggahan di Instagram pribadi, yang memperlihatkan foto-foto liburannya. Pada salah satu unggahannya, wanita cantik ini terlihat mengenakan kaos berwarna putih sambil melakukan selfie menggunakan tongsis dengan latar belakang pegunungan indah. Selain gemar berlibur, Sharipova juga suka meng-

Jangan Keliru, Ini Warna Softlens untuk Kulit Putih



Kontak lensa atau yang biasanya disebut softlens saat ini telah menjadi pilihan banyak orang. Softlens yang biasanya digunakan oleh pemilik mata minus, kini juga bisa menunjang penampilanmu agar semakin oke lho.

Softlens umumnya memiliki warna-warna yang bisa membuat tampilan matamu menjadi lebih indah dan pop-up! Untukmu yang masih bingung, yuk simak pilihan warna softlens yang cocok untuk kulit putih.

Brown

Pilihan softlens pertama dan yang paling cocok digunakan untuk pemilik kulit putih adalah warna coklat atau brown. Kamu bisa memilih beragam jenis warna coklat seperti dark brown, light brown maupun beige yang lebih terang. Ini dikarenakan warna coklat adalah termasuk warna yang natural.

Tips memilih softlens dalam kegiatan sehari-hari adalah memilih warna yang sedikit gelap seperti dark brown. Sedangkan untuk acara tertentu yang memakai makeup mata, kamu bisa memilih warna light brown ataupun beige. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhanmu ya, ladies.

Lime Green

Pilihan warna softlens yang kedua adalah lime green. Tenang, jangan membayangkan warna hijau yang sangat terang dan ngejreng ya! Walaupun agak terang, warna lime green ini masih sangat cantik dan enggak akan membuat matamu seperti ular kok, ladies.

Charcoal Grey

Softlens warna abu-abu biasanya akan membuat tampilan makeup matamu akan semakin pop-up ladies. Warna charcoal grey berada di antara abu-abu gelap dan terang. Sehingga, sangat pas walaupun kamu enggak menggunakan makeup mata yang berat. Jangan lupa gunakan bulu mata palsu yang tipis agar tampilanmu makin oke, ladies.

Emerald Green

Selanjutnya, warna softlens yang cocok digunakan untuk pemilik kulit putih adalah warna emerald green. Sekilas memang terlihat seperti warna abu-abu, namun ada sedikit campuran warna hijau di dalamnya yang membuat tampilan matamu akan berbeda. Warna hijaunya yang gelap ternyata cukup natural, membuat kamu enggak perlu menggunakan makeup mata yang berat.

Ocean Blue

Bayangkan deh ada warna biru laut terpancar dari matamu? Tenang, hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil kok! Pilihan warna softlens selanjutnya adalah warna ocean blue. Lagi-lagi, softlens ini banyak dikeluarkan di Korea Selatan, jadi kamu enggak perlu khawatir karena warna biru yang digunakan cenderung lebih ke warna biru yang tidak terlalu terang.



Itulah beberapa pilihan warna softlens untuk kulit putih. Selamat mencoba!(ins)

MENANTI SANG PENGAWAS

"Ada hakim Albertine Ho, itu tapi belum diputuskan loh ya, Pak Artidjo, saya ingat tapi lupa, dan belum diputuskan," tambah Jokowi sambil menambahkan nama Ketua KPK jilid 1 Taufiequrachman Ruki juga diusulkan sebagai calon anggota Dewan Pengawas.

Jokowi mengatakan nama-nama yang ada saat ini memang belum difinalkan. Namun, dia memastikan nantinya orang-orang yang terpilih sebagai Dewas adalah orang yang berkompeten dan memiliki rekam jejak yang baik. "Saya kira itu namanya ya nanti ditunggu sehari saja kok, yang jelas nama-namanya nama yang baik lah, saya memastikan nama yang baik," katanya.

Mengenai calon dari jaksa dan ekonom, Jokowi belum mau membocorkan nama-nama mereka. Kendati demikian, Jokowi meyakinkan bahwa nama yang terpilih merupakan sosok yang baik. "Jaksa siapa ya, ada jaksa yang tidak aktif lagi (pensiun) kelihatannya, kalau ekonom masuk biar seimbang, (anggota dewan pengawas) pasti baik-baiklah," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi dijadwalkan akan melantik lima dewan pengawas (Dewas) KPK pada 20 Desember 2019 bersamaan dengan pelantikan Pimpinan KPK 2019-2023.

Albertina Ho kini menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Dalam rekam jejaknya, nama Albertina mencuat saat menjadi ketua majelis hakim sidang kasus suap pegawai pajak Gayus Tambunan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perempuan yang dikenal dengan sebutan "srikandi hukum" itu memvonis Gayus tujuh tahun penjara.

Dalam kariernya, setelah lulus pendidikan calon hakim, Albertina bertugas di Pengadilan Negeri Yogyakarta (tahun 1986-1990). Setelah itu, Albertina dimutasi ke Pengadilan Negeri Jawa Tengah hingga akhirnya ditugaskan sebagai sekretaris Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial di MA.

Adapun Artidjo Alkostar adalah mantan Ketua Kamar Pidana MA. Artidjo dikenal sebagai algojo yang sadis memvonis berat para koruptor tanpa pandang bulu.

Artidjo setidaknya sudah pernah menangani 842 pelaku korupsi ketika menjabat sebagai Hakim Agung. Sebagian besar hukuman yang dijatuhkannya pun memberatkan terdakwa. Bahkan, terdapat dua putusan Artidjo yang 5 kali lebih berat dibanding tuntutan.

Nama-nama koruptor kelas kakap juga pernah ditangani oleh Artidjo. Di antaranya adalah Akil Mochtar (seumur hidup), Luthfi Hasan Ishaq (18 tahun penjara), Sutan Bhatogana (12 tahun penjara), OC Kaligis (10 tahun penjara), hingga Muhammad Nazaruddin (7 tahun penjara).

Sementara Taufiequrachman Ruki adalah Ketua KPK periode 2003-2007 dan pelaksana tugas ketua KPK 2015. Ruki merupakan lulusan

terbaik Akademi kepolisian (Akp) 1971. Sebelum menjabat Ketua KPK, Ruki pernah menjabat Kapolres Cianjur dan menjadi anggota DPR. Ia juga pernah menjadi Anggota Pansus dan anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI.

Sebagai catatan, pemilihan Dewan Pengawas KPK merupakan produk UU KPK hasil revisi yang sudah disahkan. Juru bicara presiden, Fadjoel Rachman, menyatakan Jokowi tak akan memilih sosok yang masih aktif sebagai penegak hukum. Meski dalam Pasal 69A ayat (2) UU KPK yang baru, dimungkinkan memilih penegak hukum aktif, asalkan berpengalaman minimal 15 tahun.

Dewan Pengawas bertugas antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya. Dewan Pengawas juga menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan Pasal 69A ayat (1) UU No 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan "Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia".

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot) menilai Artidjo sebagai hakim yang 'lurus'. "Semua sudah tahu Artidjo adalah hakim yang lurus yang kita harapkan juga sebagai pengawas itu juga bersikap tegak lurus terhadap persoalan-persoalan penegakan hukum yang ada di KPK, terutama dalam hal pemberantasan korupsi," kata Bamsot.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dewas KPK harus mempunyai komitmen pemberantasan korupsi. "Kalau bocoran saya nggak mau komentar lah nanti yang diumumkan siapa. Kalau bocoran sih, saya sih nggak peduli siapa yang nanti akan duduk jadi dewan pengawas yang penting dia punya komitmen yang sama untuk memberantas korupsi," kata Alex di gedung ACLC KPK Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/12).

Alex yang merupakan satu dari lima Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 ini berharap Presiden Jokowi memilih dewas KPK yang memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, agar pilihan Jokowi nanti sejalan dengan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

Sementara itu, Menko Polkam Mahfud MD mengatakan pihaknya belum dapat

berkomentar lebih jauh. "Saya belum tahu, jadi yang pasti siapa saja yang jadi Dewan Pengawas kita belum tahu secara resmi, mungkin tahu secara diam-diam, tapi tidak tahu secara resmi. Oleh sebab itu belum bisa komentari kalau belum resmi," ujarnya usai menghadiri Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa kepada Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rabu (18/12)

Mahfud melanjutkan, Presiden Jokowi memiliki kriteria calon anggota Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, Presiden akan memilih orang yang berintegritas, bersih dan membuat masyarakat percaya.

Independensi Diragukan

Keberagaman latar belakang calon Dewan Pengawas KPK tidak menjamin mereka akan bersikap independen ketika menjabat. Sebab, Dewan Pengawas KPK ditunjuk Presiden Jokowi secara langsung, tidak melalui seleksi yang transparan, independen dan akuntabel. Demikian diungkapkan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainur Rohman.

"Ini (Dewan Pengawas KPK) itu tidak menjamin independensi. Tanpa seleksi yang independen susah didapatkan hasil yang independen," kata Zainur. "Meskipun Presiden mengatakan Dewas KPK akan diisi oleh sosok-sosok yang baik, tetapi prosesnya tidak partisipatif dan tidak transparan. Presiden asal main tunjuk," lanjut dia.

Zainur mengatakan, sejak awal ia menolak konsep dewan pengawas yang dimunculkan melalui revisi Undang-undang KPK. Alasannya, karena dewan pengawas diberi kewenangan pro justicia atau kewenangan pemberian izin penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Padahal, dalam undang-undang diatur bahwa dewan pengawas berstatus bukan penegak hukum. Menurut Zainur, seharusnya Dewan Pengawas KPK di lembaga manapun, tak terkecuali KPK, berfungsi untuk mengawasi etik dan kinerja lembaga yang diawasi.

"Menjadi keliru jika Dewan Pengawas memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, yaitu izin penyadapan, penyitaan, penggeledahan, padahal bukan penegak hukum. Artinya bukan penegak hukum tetapi memberi atau menolak izin upaya hukum," ujar Zainur.

Belum lagi, dewan pengawas akan diisi oleh orang-orang usulan Presiden. Menurut Zainur, besar kemungkinan yang dipilih adalah orang-orang kepercayaan kepala negara. Akibatnya, Dewan Pengawas KPK justru menjadi pintu masuk presiden untuk mengendalikan KPK. Oleh karenanya, kriteria seperti apapun yang ditunjuk kepala negara sebagai Dewan Pengawas KPK, tidak akan membuat KPK menjadi independen. "Artinya bahwa mau seperti apapun, atau mau dari mana pun latar belakang dewan pengawas, tetap akan melemahkan KPK," kata Zainur. (ist,ins)

Ekspor Ilegal ke Iran, Eks Direktur Garuda Didakwa di AS



Foto : Mahan Air / Insert : Sunarko Kuntjoro

Jakarta - Kisruh yang melibatkan nama Garuda Indonesia melebar ke wilayah internasional. Mantan Direktur Garuda Indonesia, Sunarko Kuntjoro, didakwa di Pengadilan Negeri Amerika Serikat Selasa (10/12) waktu setempat atau Rabu (13/12).

Kuntjoro didakwa di Distrik Columbia pada atas dugaan melanggar hukum ekspor AS terkait sanksi AS terhadap Iran, sebagaimana diberitakan laman resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Tiga perusahaan Indonesia lain, PT MS Aero Support (PTMS), PT Kandiyasa Energi Utama (PTKEU), dan PT Antasena Kreasi (PTAK), juga disebut dalam tuduhan itu.

Nama Kuntjoro tidak asing dalam dunia penerbangan sipil Indonesia. Dia meniti karier di PT Garuda Indonesia dan pada 2005 ditunjuk sebagai direktur di bawah Emirsyah Satar. Pada 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memanggil Kuntjoro bersama dua mantan pejabat PT Garuda Indonesia lainnya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengadaan mesin pesawat Rolls-Royce semasa Emirsyah Satar menjabat direktur utama maskapai tersebut.

Menurut surat dakwaan, Kuntjoro selaku pemegang saham mayoritas dan Direktur Utama PTMS, dituduh berkonspirasi dengan beberapa pihak, antara lain maskapai Iran, Mahan Air; Mustafa Oveici, seorang

pemimpin Mahan Air; juga pihak lain dari AS, pada periode Maret 2011 hingga Juli 2018.

AS menduga ada konspirasi yang melibatkan pengangkutan barang-barang milik Mahan Air melalui PTMS, PTKEU dan PTAK ke Amerika Serikat untuk diperbaiki kemudian diekspor kembali ke Mahan Air di Iran dan di tempat lain.

Dakwaan itu menuduh Kuntjoro dan tiga perusahaan itu melakukan aktivitas itu secara ilegal untuk menipu Amerika Serikat. Kuntjoro dan PTMS juga menghadapi dakwaan untuk konspirasi pencucian uang dan membuat pernyataan palsu.

Mereka diduga mengharapkan keuntungan finansial dari aktivitas itu dengan melanggar peraturan-peraturan AS, seperti Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional 1977 (IEEPA), Peraturan tentang Transaksi dan Sanksi Iran (ITSR), peraturan ekspor, dan Peraturan tentang Sanksi Terorisme Global (GTSR).

"Para terdakwa bersekongkol untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi diri mereka sendiri dan konspirator lain, dan untuk menghindari peraturan ekspor, larangan, dan perizinan persyaratan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA), Peraturan Transaksi dan Sanksi Iran (ITSR), Peraturan Administrasi Ekspor, dan Peraturan Sanksi Terorisme Global (GTSR)," jelas lembaga itu.

Departemen Keuangan Amerika Serikat menggolongkan Mahan Air sebagai organisasi yang diblokir karena diduga menyediakan dukungan finansial, material, dan teknologi bagi Pasukan Garda Revolusi Islam Iran.

Dijelaskan dalam portingan bahwa Kuntjoro berkonspirasi dengan Mahan untuk mengangkut barang-barang milik Mahan melalui PTMS, PTKEU dan PTAK ke Amerika Serikat untuk diperbaiki dan diekspor kembali ke Mahan di Iran dan beberapa wilayah lain. Akibatnya, barang-barang itu tidak mendapat lisensi sebagaimana mestinya.

Kuntjoro terancam hukuman maksimum lima tahun penjara dan denda US\$250.000 (Rp3,5 miliar) untuk tuduhan konspirasi melanggar IEEPA dan menipu pemerintah AS; maksimum 20 tahun penjara dan denda US\$1 juta (sekitar Rp14 miliar) atas tuduhan melanggar IEEPA.

Dia juga terancam hukuman maksimum 20 tahun penjara dan denda US\$500.000 (sekitar Rp7 miliar) atas tuduhan konspirasi pencucian uang; dan maksimum 5 tahun penjara dan denda US\$250.000 atas tuduhan membuat pernyataan palsu.

Penyelidikan kasus ini dilakukan oleh agen khusus dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Biro Industri dan Keamanan, Kantor Penegakan Peraturan Ekspor, dengan bantuan dari agen khusus dari Homeland Security Investigations di San Diego dan Miami.(ist)